



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 117 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor 15);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 117

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 117 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



DISPERDAGIN
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

**DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558 Fax. (022) 5894558 Soreang 40911

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Email : disperin@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 800 / Kep. - Sekr / 2025

Lampiran : 1 (satu)

T e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan keharusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk tim;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Daerah tahun 2025, dengan keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Pelatihan, dan Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Perdagangan tahun sebelumnya.
2. Menyusun program dan kegiatan prioritas untuk menunjang peningkatan kemudahan Pelaku IKM, dan Pengembangan Produk.
3. Menyusun jadwal pelaksanaan dan melaksanakan Forum PD untuk menyinkronkan program dan kegiatan prioritas Dinas PD terkait dengan usulan masyarakat.
4. Menyusun kriteria teknis Pelatihan, dan Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM).
5. Menyusun kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas.
6. Menyusun Perubahan Rencana Kerja tahunan berdasarkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung serta Rensta Dinas.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4).
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 No 4 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005- 2025;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;
47. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

48. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
49. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
50. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 000.8./048 / 959 C / BAPPERIDA Tanggal 25 Maret 2025 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Ditetapkan di Soreang, Juni 2025

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si

NIP: 19740717 199803 1 003

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800/ Kep. -Skr / 2025

TANGGAL : Juni 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

- Pengarah : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Ketua : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusun Program
- Kelompok 1 : Perencanaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Ketua : Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi
- Anggota : 1. Analis Perdagangan Ahli Muda
- Kelompok 2 : Perencanaan Pengembangan Perdagangan Dan Pengendalian Barang Pokok Dan Penting
- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dan Pengendalian Barang Pokok Dan Penting
- Anggota : 1. Analis Perdagangan Ahli Muda
- Kelompok 3 : Perencanaan Kemetrolagian, Energi dan Sumber Daya Mineral
- Ketua : Kepala Bidang Kemetrolagian, Energi dan Sumber Daya Mineral
- Anggota : 1. Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda
2. Analis Kebijakan Ahli Muda
- Kelompok 4 : Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Industri
- Ketua : Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri

- Anggota : 1. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda
- Kelompok 5 : Perencanaan Pengawasan Dan Kerja sama Industri
- Ketua : Kepala Bidang Pengawasan Dan Kerja sama Industri
- Anggota : 1. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda
- Kelompok 6 : Perumusan dan Penyusunan Dokumen Renja
- Ketua : Perencana Ahli Muda
- Anggota : 1. JFU Analis Perencanaan Anggaran
2. JFU Pengelola Bahan Perencanaan

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si

NIP: 19740717 199803 1 003

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERUBAHAN
RENJA DISPERDAGIN**

KABUPATEN BANDUNG

NO	JENIS KEGIATAN	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
6	Penelaahan RKPD Kabupaten Bandung	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			

NO	JENIS KEGIATAN	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati Bandung	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			

NO	JENIS KEGIATAN	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang telah disahkan	√			

KEPALA DINAS
 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
 KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si
 NIP: 19740717 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiyullah Rasulullah Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan dengan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian.

Sangatlah disadari bahwa penyajian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Wassalamu'alaikum wr wb.

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si

NIP: 19740717 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. LANDASAN HUKUM	2
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
I.4. SISTEMATIKA.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	9
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	9
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	41
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	60
II.3.1. Identifikasi Permasalahan	61
II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis.....	63
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	73
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	93
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	161
III.1. TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	161
III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	161
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	163
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	176
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	200
BAB V P E N U T U P	210

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan) yang disusun Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah akibat dari beberapa hal yang termasuk didalamnya adalah Inpres No.1 Tahun 2025, bahwa Perangkat Daerah harus melakukan efisiensi anggaran pada lima kode rekening belanja dan dialihkan pada penanganan rencana kerja tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan potret kebutuhan pembangunan perekonomian serta indikator sasaran program yang akan dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber anggaran lain yang sah sesuai peraturan

perundangan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada dasarnya sudah ditempuh tahapan penyusunan secara sistematis, yakni persiapan melalui proses sebagai berikut: (a) pengolahan data dan informasi; (b) analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (c) me-review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra 2021-2026; (d) penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (e) penelaahan Penetapan RKPD kabupaten; (f) perumusan tujuan dan sasaran; (g) penelaahan usulan masyarakat; dan (h) perumusan kegiatan prioritas.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- l. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 - v. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;
 - w. Peraturan Bupati Bandung 92 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah :

1. Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2026;
2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun yakni tahun 2021-2026 dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani tahun 2025;
3. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Pada Tahun 2025;
4. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dijadikan pedoman para pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada akhir tahun 2025;
5. Menjabarkan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program dan kegiatan prioritas;
6. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2025;
7. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Penetapan rencana

kerja anggaran perubahan (RKA) Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

8. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.
9. Pelaksanaan Inpres No.1 Tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan

hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap Rancangan RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan. Terkait dengan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk belanja sebesar **Rp45.590.266.759,00** (*Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*). Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan ini :

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp198.704.250	Rp181.744.200	91%
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp198.704.250	Rp181.744.200	91%
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Rp165.706.250	Rp156.546.200	94%
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Rp 32.998.000	Rp25.198.000	76%
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp -	Rp -	-
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp731.821.450	Rp610.321.700	83%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp731.821.450	Rp610.321.700	83%
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp475.590.450	Rp469.290.700	99%
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp256.231.000	Rp141.031.000	55%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 1.904.277.351	Rp1.892.842.800	99%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp162.133.800	Rp152.304.800	94%
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp -	Rp -	-
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp162.133.800	Rp152.304.800	94%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp -	Rp -	-
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 1.724.913.551	Rp1.723.308.000	100%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 1.694.843.551	Rp 1.693.368.000	100%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 6.810.000	Rp 6.810.000	100%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 23.260.000	Rp23.130.000	99%
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp17.230.000	Rp17.230.000	100%
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Rp -	Rp -	-
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp 17.230.000	Rp17.230.000	100%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp -	Rp -	-
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 2.031.300.857	Rp1.908.723.124	94%
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.905.145.357	Rp1.785.767.624	94%
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp324.178.750	Rp320.853.050	99%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.580.966.607	Rp1.464.914.574	93%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp126.155.500	Rp122.955.500	97%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp126.155.500	Rp122.955.500	97%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp237.461.000	Rp233.651.500	98%
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp211.331.000	Rp209.161.500	99%
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp211.331.000	Rp209.161.500	99%
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 12.850.000	Rp11.380.000	89%
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp12.850.000	Rp11.380.000	89%
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Rp 13.280.000	Rp13.110.000	99%
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Rp13.280.000	Rp13.110.000	99%
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp229.201.996	Rp225.562.336	98%
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp229.201.996	Rp225.562.336	98%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp59.500.626	Rp58.823.400	99%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp169.701.370	Rp166.738.936	98%
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Rp-	Rp -	-
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp36.792.465.843	Rp35.419.307.588	96%
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp-	Rp -	-
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp-	Rp -	'-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp-	Rp -	-
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp777.242.050	Rp741.195.406	95%
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.500.000	Rp7.495.000	100%
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp430.991.050	Rp429.656.825	100%
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp20.000.000	Rp19.979.460	100%
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp20.000.000	Rp13.592.000	68%
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp156.292.000	Rp128.584.774	82%
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp142.459.000	Rp141.887.347	100%
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 55.000.000	Rp54.540.000	99%
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp55.000.000	Rp54.540.000	99%
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp-	Rp -	-
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp564.473.950	Rp512.374.903	91%
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp89.570.000	Rp72.328.554	81%
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.000.000	Rp24.530.000	98%
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp215.012.000	Rp194.588.105	91%
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp234.891.950	Rp220.928.244	94%
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp596.103.088	Rp567.421.878	95%
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100%
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp10.000.000	Rp9.130.000	91%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp152.834.088	Rp151.070.492	99%
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100%
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp398.269.000	Rp372.221.386	93%
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100%
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.000.000	Rp5.000.000	100%
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp32.402.321.875	Rp31.267.900.389	96%
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	100%
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp15.000.000	Rp14.089.000	94%
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp32.363.321.875	Rp 31.229.811.689	96%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp14.000.000	Rp13.999.700	100%
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.397.324.880	Rp2.275.875.012	95%
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp148.212.000	Rp105.334.012	71%
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.249.112.880	Rp2.170.541.000	97%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 5.104.205.476	Rp4.641.868.793	91%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 5.104.205.476	Rp4.641.868.793	91%
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp187.670.000	Rp186.332.400	99%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp38.728.983	Rp38.728.000	100%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp871.294.800	Rp851.840.863	98%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 4.006.511.693	Rp3.564.967.530	89%
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp-	Rp -	-
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp175.913.000	Rp174.253.868	99%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp175.913.000	Rp174.253.868	99%
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp98.217.600	Rp97.749.600	100%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp77.695.400	Rp76.504.268	98%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp208.326.000	Rp208.326.000	100%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp208.326.000	Rp208.326.000	100%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Rp78.156.000	Rp78.156.000	100%
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp30.115.000	Rp30.115.000	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp100.055.000	Rp100.055.000	100%
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Rp 97.136.200	Rp93.664.850	96%
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 97.136.200	Rp93.664.850	96%
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp83.826.000	Rp81.234.850	97%
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.830.200	Rp8.760.000	99%
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.480.000	Rp3.670.000	82%
Jumlah		Rp 47.710.813.423	Rp 45.590.266.759	96%

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran yang berbentuk *output* pada tahun 2023, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 berdasarkan pada *outcome* setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.2

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	100%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%
3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	100%	95%	80%	95%	119%	80%	90%	90%
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.29.05.2.0 1.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan dan jumlah dokumen informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi yang dikeluarkan	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
3.29.05.2.0 1.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	85 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	51 Laporan	60%
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	87,00	80.15 Poin	77 Poin	82 Poin	106%	83 Poin	83 Poin	95%
3.30.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	2 Dokumen	7 Dokumen	70%
3.30.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	60%
3.30.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	60%
3.30.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan	214 Orang/Bulan	214 Orang/Bulan	100%	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan	100%
3.30.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin pegawai	79%	85%	78%	80%	103%	100%	88%	113%
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	7 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	7 Orang	14 Orang	67%
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
3.30.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
3.30.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
3.30.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	112 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	72 Laporan	64%
3.30.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	100%	125 Laporan	375 Laporan	70%
3.30.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	150%
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	4 Unit	57%
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	18 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	18 Unit	43 Unit	58%
3.30.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	12 Unit	39 Unit	65%
3.30.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	24 Unit	60%
3.30.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
3.30.01.2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	0%	0%	-	#VALUE!	100%	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.1 1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	0,00	0,00	0,00	0%	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	1200%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	80%	58%	65%	65%	101%	70%	64%	81%
3.30.02.2.0 1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang memiliki izin	80%	77%	65%	83%	127%	70%	77%	96%
3.30.02.2.0 1.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.02.2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang memiliki tanda daftar	30%	0%	15%	28%	185%	20%	16%	53%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.02.2.0 2.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.02.2.0 3	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	50%	29%	20%	39%	194%	10%	39%	78%
3.30.02.2.0 3.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	25%	13%	20%	20%	100%	21%	21%	84%
3.30.03.2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	75%	67%	60%	67%	111%	65%	66%	88%
3.30.03.2.0 1.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	3 Unit	10 Unit	333%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	55 Unit	12 Unit	26 Unit	35 Unit	135%	11 Unit	58 Unit	105%
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	13,0%	7,1%	5,0%	2,4%	47%	7,5%	8%	58%
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3%	3%	3%	3%	97%	3%	3%	99%
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	54%	55%	80%	98%	123%	80%	78%	144%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.04.2.0 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
3.30.04.2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga dan stok BAPOKTING di tingkat pasar Kabupaten/Kota yang dikendalikan	89%	94%	89%	117%	131%	89%	100%	112%
3.30.04.2.0 2.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.04.2.0 2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	168 Laporan	192 Laporan	320%
3.30.04.2.0 2.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	80%
3.30.04.2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer	90%	22%	50%	50%	100%	90%	54%	60%
3.30.04.2.0 3.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	25 Laporan	42%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Eksport Bersih Perdagangan Non Migas	\$ 727.432.463	1.048.724.223,27	\$ 726996440	\$ 1108872543,35	153%	727.141.781,00	\$ 1108872543,35	152%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	15%	0%	4%	0%	0%	4%	4%	27%
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	0,00	0,00	-	0%	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	33%
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0%	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	33%
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0%	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	20%
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	75 Produk	15 Produk	15 produk	15 produk	100%	15 Produk	45 Produk	60%
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP sesuai standar	100%	89%	85%	85%	101%	90%	88%	88%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat UTP yang bertanda Tera sah	100%	32%	85%	29%	34%	90%	50%	50%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20000 Unit	3627 Unit	2000 Unit	3112 Unit	156%	5000 Unit	11739 Unit	59%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 Orang	200 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	350 Orang	590 Orang	59%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	42%	13%	21%	21%	101%	28%	28%	67%
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	100%	20%	40%	45%	113%	60%	60%	60%
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120 UMKM	0,00	40 UMKM	40 UMKM	100%	50 UMKM	90 UMKM	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.07.2.0 1.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	120 UMKM	0,00	40 UMKM	40 UMKM	100%	40 UMKM	80 UMKM	67%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan sumber daya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	100%	32%	40%	56%	140%	60%	60%	60%
3.31.02.2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	25 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	11 Dokumen	44%
3.31.02.2.0 1.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	120%
3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.31.02.2.0 1.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	15%	10%	8%	9%	124%	10%	10%	67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	100 Perusahaan	17 Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%	95 Rekomendasi	132 Rekomendasi	132%
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang Berlokasi di Satu Kabupaten/Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain Bidang usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah -Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah -Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	33%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Persentase pelaporan SIINAS	100%	30%	40%	52%	130%	60%	60%	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	100%	33%	40%	42%	104%	60%	60%	60%
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.04.2.0 1.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si
NIP: 19740717 199803 1 003

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga banyak program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak dapat direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah tidak maksimal.

Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada misi Kepala Daerah, misi ke 1 (satu) yaitu: **“Membangkitkan Daya Saing Daerah”** merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”. Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2021-2026

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya produktivitas perindustrian	Tertatanya sentra industri	Merencanakan dan membangun sentra industri	Penetapan sentra industri
			Optimalisasi standardisasi produk IKM

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
yang berdaya saing			Optimalisasi pendampingan IKM dalam pemasaran produk
			Optimalisasi sarana dan prasarana IKM
	Meningkatnya kepatuhan industri	Meningkatkan pengendalian izin dan pengawasan industri	Optimalisasi perizinan perusahaan industri
	Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini	Meningkatkan Pengelolaan Pelaporan Produksi pada SIINAS	Peningkatan Monitoring dan Pendampingan dalam pelaporan Produksi melalui SIINAS
Meningkatnya pelayanan distribusi barang di dalam wilayah	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan di wilayah	Meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada pasar rakyat dan pedagang kaki lima	Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat
			Pembinaan dan penataan PKL di lingkungan pasar rakyat
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin usaha dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan
			Fasilitasi penerbitan rekomendasi tanda daftar Gudang
			Fasilitasi penerbitan rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang bagi Wajib Tera Ulang
			Monitoring dan Evaluasi terhadap alat UTTP pasca Tera/Tera ulang & Pembinaan/penyuluhan Metrologi Legal
Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	Meningkatkan Nilai Ekspor	Peningkatan promosi luar negeri
			Pembinaan dan Pengembangan produk ekspor
			Peningkatan produk ekspor
		Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk Kabupaten Bandung	Pelaksanaan Promosi Produk melalui <i>event</i> pameran
			Pelaksanaan kerja sama dengan media <i>online</i> sebagai upaya pemasaran produk
		Mendorong stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi
			Monitoring dan Evaluasi bahan pokok dan barang penting
Meningkatnya pengelolaan langsung panas bumi	Meningkatnya kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi	Mewujudkan penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera		
Misi	Membangkitkan Daya Saing Daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan instansi organisasi	Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi	Peningkatan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi

Upaya-upaya diatas merupakan program kegiatan prioritas yang terdapat pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang dapat meningkatkan anggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sesuai dengan perencanaan kebutuhan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 T-C. 30

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PERDAGANGAN										
1	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	\$726.851.099	\$726.996.440	\$727.141.781	\$727.287.122	\$727.432.463	\$1.048.724.223	\$1.108.872.543	\$727.287.122	\$727.432.463	
2	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	14%	21%	28%	35%	42%	13%	21,4%	35%	42%	
3	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2,91%	3%	3%	
4	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	20%	20%	22%	23%	25%	13%	20%	23%	25%	
5	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	60%	65%	70%	75%	80%	58%	65%	75%	80%	
6	Persentase Alat UTTP sesuai standar	80%	85%	90%	95%	100%	89%	85%	95%	100%	
	URUSAN PERINDUSTRIAN										
7	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	20%	40%	60%	80%	100%	32%	56%	80%	100%	
8	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	5%	8%	10%	13%	15%	10%	9%	13%	15%	

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Persentase pelaporan SIINAS	20%	40%	60%	80%	100%	30%	52%	80%	100%	
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM										
10	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	100%	

Tabel 2.5

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

No.	TUJUAN PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah	Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Nilai PDRB sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor x 100%/ Nilai PDRB	BPS
		Meningkatnya Distribusi Presentase PDRB Industri Pengolahan	Distribusi Persentase PDRB Industri Pengolahan	Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan x 100%/ Nilai PDRB	BPS

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Utama tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1

SASARAN 1		Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi Ekspor				
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Ekspor Produk IKM	\$726,851,099.00	\$1,048,724,223.27	144%	\$726,996,440.00	\$1108872543,35	153%

Pertumbuhan nilai ekspor itu sendiri pada tahun 2023 mencapai \$ 1108872543,35 dengan persentase capaian sebesar 153%. Upaya pencapaian Sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di bidang ekspor di wilayah Kabupaten Bandung terhadap peraturan dan kebijakan pengurusan dokumen ekspor yang sering mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023 kegiatan ini diikuti sebanyak 75 peserta bagi pelaku usaha ekspor.

2. Pengembangan *database* informasi potensi unggulan.

Pengembangan *database* informasi potensi unggulan ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki produk potensi unggulan ekspor, sehingga tersedianya *database* informasi potensi produk unggulan produk ekspor dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekspor dan memudahkan informasi tentang pasar tujuan ekspor.

3. Peningkatan citra produk ekspor

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait / asosiasi / pengusaha bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kendala yang menjadi penghambat untuk melakukan ekspor produk dari Kabupaten Bandung ke luar negeri serta peluang pasar tujuan ekspor baru yang dapat di intervensi oleh para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung. Sehingga produk ekspor Kabupaten Bandung tidak hanya didominasi oleh tekstil dan produk tekstil saja tetapi komoditas lainnya, saat ini mulai muncul komoditas baru di Kabupaten Bandung yang menjadi potensi ekspor diantaranya kopi. Pada tahun 2023, kegiatan Focus

Group Discussion (FGD) Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah diikuti oleh 15 peserta.

4. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota serta Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan promosi penggunaan produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pameran bagi produk unggulan Kabupaten Bandung sejumlah 15 produk unggulan yang difasilitasi promosi dan pemasarannya. Jumlah kegiatan pelaksanaan promosi yang dimaksud dilakukan sebanyak 6 kali yaitu Dukungan Fornas, Fasilitasi Penguatan Pemasaran Produk IKM Kab. Bandung Melalui E-Commerce (Blibli), Food Ethnic, bazar ramadhan, pameran inacraft dan pameran APKASI dengan anggaran sebesar Rp731.821.450,00 dan terealisasi sebesar Rp610.321.700,00 atau sebesar 83%.

5. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam meningkatkan pemasaran produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melaksanakan sosialisasi terhadap Mahasiswa Tel-U sebanyak 50 Mahasiswa dan pameran Kembang Nusa di Gedung Graha Siliwangi sebanyak 8 IKM dengan anggaran sebesar Rp731.821.450,00 dan terealisasi sebesar Rp610.321.700,00 atau sebesar 83%.

6. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional dan mengurangi angka inflasi daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai saat ini memiliki inovasi daerah yaitu aplikasi SIBAPOKTING yang menunjukkan harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dengan data paling *update* dan *real time*. Selain itu, dilakukan juga Operasi Pasar Murah (OPM) ketika terjadi kelangkaan bahan pokok dan barang penting di masyarakat. selain itu, dilakukan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan barang pokok dan barang penting terhadap pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp162.133.800,00 dan terealisasi Rp152.304.800,00 atau sebesar 94%

Adapun perkembangan jumlah volume ekspor pada tahun 2023 dengan rincian perkembangan volume ekspor per bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.1 Perkembangan Volume Ekspor (KGM)

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.7 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Potensi produk ekspor Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tekstil dan produk tekstil dan diperlukan pengembangan produk ekspor baru sehingga tidak hanya tergantung pada produk tekstil. Selain itu negara tujuan ekspor masih tergantung pada negara-negara diwilayah Eropa dan sebagian Asia diperlukan perluasan negara tujuan baru pemasaran produk ekspor	Melakukan pendataan dan pengembangan tentang potensi produk unggulan Kabupaten Bandung yang dapat dijadikan produk ekspor. Yang saat ini sedang dilakukan adalah mendata peluang pasar. Negara tujuan ekspor baru melalui kegiatan pameran produk unggulan kopi di tingkat Internasional. Selanjutnya akan dibuat <i>database</i> ekspor
2.	Masih minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga akses pemasaran produk	Melakukan pelatihan tentang ekspor bagi pelaku UKM dan IKM yang memiliki produk potensi ekspor sehingga kedepannya apabila ada UKM dan IKM yang memiliki potensi

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
	UKM selama ini masih terpaku pada pemasaran domestik. Adapun beberapa UKM yang sudah memiliki pasar di luar negeri tetapi mereka terbentur dengan pengetahuan bagaimana cara ekspor sehingga produk yang mereka jual tidak dapat dipasarkan	ekspor dapat melakukan pengiriman produknya secara langsung tanpa melalui perantara lagi, Mengirim sampel produk IKM ke <i>Buyer</i> , Melaksanakan temu bisnis antara IKM dan <i>Buyer</i> atau pembeli

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

SASARAN 2	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah					
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas di Wilayah	20%	13%	65%	20%	20%	100%

Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas di wilayah kerjanya pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian sebesar 20%. Upaya untuk pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja dan kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB dilakukan upaya-upaya sebagai berikut ini:

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Bandung untuk menjalankan usahanya dalam hal pemasaran produk dengan membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha toko modern agar dapat memberikan fasilitasi untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Bandung, dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Peindustrian memberikan hibah 6 Roda Kecil diberikan kepada 3 Bumdes yaitu Bumdes Ciwidey, Bumdes Margahayu, Bumdes Baleendah dengan anggaran sebesar Rp211.331.000,00 dan realisasi sebesar Rp209.161.500,00 atau sebesar 127%.

2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dengan memperbaiki sarana dan prasarana distribusi barang/produk salah satunya ialah sarana dan prasarana pasar tradisional yang merupakan salah satu pusat perdagangan yang baik, bersih dan sehat. Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp Rp1.905.145.357,00 dan realisasi sebesar Rp1.785.767.624,00 atau sebesar 94%. Perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 4 pasar, yaitu Renovasi untuk Pasar Baleendah, Ciwidey, Majalaya, dan Banjaran. Jumlah anggaran tersebut bersumber dari APBD dan dari Dana Insentif Daerah (DID) yaitu pembangunan bak sampah Pasar Margahayu, Majalaya, Ciwidey serta Pengadaan Countener sampah sebanyak 9 unit.

3. Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi. TDG merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah tindak pidana ekonomi terhadap jenis-jenis barang tertentu yang diawasi peredarannya oleh Pemerintah. TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG. Jumlah gudang yang mendapatkan fasilitasi penerbitan TDG sebanyak 15 gudang. Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.380.000,00 atau sebesar 89%.

4. Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik

STPW merupakan bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi atau direkomendasi STPW dalam dan luar negeri sebanyak 57 pelaku usaha dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp13.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.110.000,00 atau sebesar 99%.

5. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan pengelolaan distribusi perdagangan. Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya pada Tahun

2023 sebanyak Unit sarana prasarana pasar tradisional dengan nilai anggaran sebesar Rp324.178.750,00 dan terealisasi sebesar Rp320.853.050,00 atau sebesar 99%.

6. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemberian binaan kepada para pelaku sarana distribusi perdagangan. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan pada tahun 2023 sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp126.155.500,00 dan realisasi sebesar Rp122.955.500,00 atau sebesar 97%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.9 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Masih banyak toko modern yang enggan mengurus perijinan atau beroperasi sebelum permohonan ijinnya diterima sehingga terkesan banyak pelanggaran ijin pendirian toko modern tersebut	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional dan perijinan toko modern serta memberikan pemahaman tentang keberlangsungan hidup/usaha toko modern tidak ditujukan untuk mematikan usaha pasar tradisional serta menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha mikro, kecil yang berada disekitar toko modern tersebut
2.	Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan terutama bagi pasar tradisional memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Bandung tidak mencukup untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung	Untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bandung sehingga menjadi pasar yang nyaman, bersih dan sehat dengan tidak hanya bergantung pada APBD maka kami melakukan inovasi dengan menawarkan kerja sama pembangunan dan pengelolaan pasar kepada pihak ketiga (investor)

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3

SASARAN 3		Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen				
Indikator Kinerja	Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Persentase alat UTTP sesuai standar		80%	89%	111%	85%	85%
						100%

Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dalam hal ini ialah tentang kepatuhan pelaku usaha tertib ukur pada alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang digunakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Bandung. Upaya untuk mewujudkan saran ini terkait dengan tujuannya meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan peningkatan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya untuk mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dalam ketertiban serta kepatuhan untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur dilakukan melalui peningkatan operasionalisasi pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di wilayah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh UPT Kemetrollogian Kabupaten Bandung.

2. Dengan adanya UPT Kemetrollogian diharapkan peran pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP yang selama ini dilakukan oleh Balai Kemetrollogian Provinsi Jawa Barat bisa lebih optimal dapat memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan kinerja perdagangan dalam negeri dan telah dilakukan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP sebanyak 3.112 unit alat UTTP.

3. Sosialisasi tentang Kemetrollogian

Upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dan BDKT sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan kepada konsumen, dilakukan sosialisasi tentang peraturan, kebijakan dan peran kemetrollogian dalam meningkatkan perdagangan dalam negeri. Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi dengan jumlah peserta 40 orang yang berasal dari pelaku usaha, instansi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut masih banyak pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah sendiri yang belum mengerti serta paham tentang apa itu kemetrollogian dan kenapa mesti melakukan tera dan tera ulang alat UTTP. Sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan strategi lain yang lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi tentang kemetrollogian.

4. Pengawasan Kemetrollogian

Pengawasan kemetrollogian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang baik dan kondusif melalui terciptanya lingkungan usaha yang tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023

bekerja sama dengan Pengawas Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan RI terhadap 2.386 unit alat UTTP.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.11 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP yang dilakukan oleh UPT Kemetrologian belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini ialah fungsional penera yang dimiliki oleh UPT Kemetrologian Kabupaten Bandung baru ada 4 orang yang merupakan pelimpahan dari Provinsi Jawa Barat, sedangkan area pelayanan begitu luas mencakup 31 kecamatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta bekerja sama dengan Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan RI untuk penambahan petugas penera, disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera baru pada tahun - tahun yang akan datang dengan memberikan biaya diklat kemetrologian bagi calon penera baru
2.	Pengawasan kemetrologian saat ini belum maksimal dikarenakan belum memiliki fungsional pengawas dan PPNS Kemetrologian yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, serta minimnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang aturan kemetrologian	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta tentang kemetrologian serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi bergerak dibidang perlindungan konsumen untuk bersama-sama melakukan pengawasan kemetrologian untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4

SASARAN 4	Tertatanya Sentra Industri					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sentra Industri yang sudah tertata	7%	7%	100%	40%	56%	140%

*Realisasi tahun 2023 menggunakan proyeksi target tahun 2023

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun 2023 dalam meningkatkan daya saing produk industri kecil diantaranya dengan meningkatkan kemampuan teknologi industri dan standarisasi produk industri, untuk mewujudkan

hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kemampuan para pelaku industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam menggunakan teknologi industri sehingga dapat meningkatkan produksi produk menjadi lebih efektif dan kualitas yang memiliki daya saing. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp4.006.511.693,00 dan realisasi sebesar Rp3.564.967.530,00 atau sebesar 89% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT, DAK FISIK, DAK NON FISIK. Pada tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi standarisasi produk bagi industri kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman, hasil hutan dan perkebunan sebanyak 100 IKM baik itu pelaku industri kecil dibidang olahan makanan maupun hasil hutan dan perkebunan, Dokumen Kajian Sentra Industri Tembakau (DBHCHT), IKM yang mendapatkan Bimtek Manajemen Mutu sebanyak 40 IKM, IKM yang mendapatkan Bimtek Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu sebanyak 50 IKM, IKM yang mendapatkan Bimtek Produksi/Standarisasi Produk sebanyak 45 IKM, IKM yang mendapatkan sosialisasi Temu Usaha IKM sebanyak 50 IKM, IKM yang mendapatkan Workshop/Sosialisasi Tembakau sebanyak 150 IKM, Pengadaan Mesin/Peralatan Pengolahan Aneka Kue, Revitalisasi Pusat Promosi/Ruang Pamer Sentra bertempat di Galeri Kriya Bedas Kabupaten Bandung.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung salah satunya industri kecil di bidang olahan makanan dan minuman yang merupakan salah satu industri kecil unggulan yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil dilakukan upaya kegiatan pelatihan kemasan bagi industri olahan makanan dan minuman selain itu juga diberikan fasilitasi desain produk bagi industri kecil secara gratis, fasilitasi pembuatan desain produk dan kemasan yang diberikan oleh Tim Desain dan Kemasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp871.294.800,00 dan realisasi sebesar Rp851.840.863,00 atau sebesar 98% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT, dan DID. Pada tahun 2022 IKM yang terpenuhi sarana prasarannya sebanyak 4 IKM, IKM yang mendapatkan Fasilitasi Peralatan Produksi Tembakau sebanyak 1 kelompok IKM, IKM yang mendapatkan Workshop/Bimtek Pengolahan Limbah Tembakau sebanyak 50 IKM, IKM yang tersertifikasi Profesi sebanyak 20 IKM.

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri bersumber dari anggaran APBD dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan jumlah sebesar Rp187.670.000,00 realisasi sebesar Rp186.332.400,00 atau sebesar 99% dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Industri
- b. Dokumen Web dan Skema Pendampingan
- c. Sosialisasi terhadap 50 IKM
- d. IKM yang mendapatkan Workshop perbaikan kemasan sebanyak 120 IKM
- e. IKM yang tersertifikasi Profesi sebanyak 20 IKM

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.13 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-4

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Penerapan standarisasi produk, Pengetahuan dan pemahaman pelaku industri kecil terhadap pentingnya HKI merek dagang dan sistem mutu produk masih kurang.	pendampingan dan memfasilitasi dalam peningkatan daya saing mutu produk IKM melalui fasilitasi desain produk dan desain kemasan, pengurusan standarisasi produk dan fasilitasi HKI merek dagang.

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-5

SASARAN 5		Meningkatnya Kepatuhan Industri				
Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2022			Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Persentase Kepatuhan Industri		5%	9.5%	190.0%	7.5%	9.33%
						124%

Melihat pada ilustrasi data pada tabel di atas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai 124% hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian sasaran “Meningkatnya kepatuhan Industri” sangat baik dengan pencapain indikator kepatuhan industri. Meskipun pencapain kinerja pada tahun 2023 sudah mencapai target sasaran yang ditetapkan, pengembangan dan meningkatkan kepatuhan dalam perizinan industri kecil

dan menengah, untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri masih perlu ditingkatkan pada tahun yang akan datang sehingga produk industri kecil Kabupaten Bandung dapat bersaing dengan produk daerah lain bahkan produk dari luar negeri.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan industri terhadap perizinannya adalah sebagai berikut ini:

- 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI adalah untuk pemberian izin kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan, mengembangkan, dan menambah kegiatan usaha. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, dilakukan dua kegiatan yaitu fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam SIINas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara eletronik. Kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki anggaran sebesar Rp175.913.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.253.868,00 atau sebesar 99%, dengan aktifitas kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi perizinan IUI secara elektronik sebanyak 56 peserta yang terdiri dari IKM dan perusahaan industri
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap 75 Perusahaan industri.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.15 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-5

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah disebabkan oleh fluktuatifnya harga	Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada IKM, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -6

SASARAN 6		“Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi Ekspor”				
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Industri yang Terdata dalam SIINas	20%	28%	138%	40%	40%	100%

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Industri yang terdata dalam SIINAS adalah sebagai berikut ini:

1. Penyediaan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI direalisasikan kedalam tiga kegiatan yaitu yang pertama fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selanjutnya yaitu Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas. Sedangkan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp208.326.000,00 dan realisasi sebesar Rp208.326.000,00 atau sebesar 100%.

Tabel 2.17 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke -6

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Kurangnya ketegasan dari pimpinan mengenai data yang harus dilaporkan ke SIINas. Proses verifikasi di kementerian memakan waktu cukup lama dan juga sering terdapat pengembalian data karena terdapat syarat yang kurang	Melakukan pendampingan ke lapangan atau ke perusahaan untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan pendaftaran SIINas

Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-7

SASARAN 7	Meningkatnya Kualitas Layanan Perijinan serta Pengendalian dan Pengawasan Industri Panas Bumi					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengelolaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang Menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan	80%	80%	100.0 %	80%	80%	100%

Capaian Kinerja pada indikator di atas target yang ditetapkan yaitu Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi sebagai sumber energi pada tahun 2023 terealisasi 80% dari target 80% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Data yang kami sampaikan untuk urusan energi saat ini hanya meliputi pemanfaatan panas bumi secara langsung dikarenakan urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten/kota saat ini hanya pengawasan pemanfaatan panas bumi secara langsung sedangkan merupakan urusan energi dan sumber daya mineral lainnya dilimpahkan kewenangannya menjadi kewenangan Provinsi.

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi uap panas bumi yang cukup banyak. Sampai saat ini terdapat 3 wilayah Kawasan Pengembangan Panas Bumi yaitu Pangalengan, Kamojang-Darajat dan Cibuni dengan yang dikelola oleh 5 pengembang yaitu Pt Star Energy Geothermal Wayang Windu LTD dan PT Geo Dipa Energi (Pangalengan), PT.PGE (Pertamina Geoterhaml Energy Area Kamojang), PT. Star Energy Geothemal Darajat II Limited (Darajat) serta PT. Teknosatria

energi Geothermal (Cibuni). Namun, untuk wilayah cibuni sampai saat ini belum melakukan operasionalisasi eksplorasi pemanfaatan panas bumi. Upaya untuk mewujudkan tujuan meningkatnya pemanfaatan volume uap panas bumi sebagai sumber energi dengan melakukan serbagai upaya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan panas bumi dengan instansi terkait baik itu pemerintah usat, provinsi maupun pihak pengembang PLTP terkait seberapa besar volume yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan sebagi sumber energi. Potensi volume panas bumi di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2023 terdapat 4 potensi yang dapat dimanfaatkan dari total 5 potensi yang tersedia atau sebesar 80%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.19 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke -7

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Belum optimalnya pemanfaatan volume uap panas bumi yang dihasilkan sebagai sumber daya energi dikarenakan energi uap panas bumi yang dihasilkan hanya bergantung pada satu perusahaan yang bersedia membeli hasil sumber energi yang dihasilkan oleh panas bumi yaitu PT. PLN, serta masih terdapat 1 wilayah pengembangan panas bumi yang belum bisa dimanfaatkan	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bagaimana solusi dan kebijakan pemerintah pusat dalam pemanfaatan volume uap panas bumi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara efektif, serta mencari peluang lain investor atau perusahaan yang dapat membeli energi dari uap panas bumi yang dihasilkan sehingga potensi energi uap panas bumi bisa dimanfaatkan dengan optimal
2.	Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang paham dan mengerti dibidang panas bumi saat ini hanya terdapat 1 orang yang paham tentang bidang panas bumi, serta kebijakan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan panas bumi diwilayah Kabupaten Bandung sangat minim	Diperlukan regenerasi dan pengaderan untuk sumber daya manusia yang mengerti tentang panas bumi serta pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan monitoring pemanfaatan panas bumi secara bertahap agar proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan panas bumi di lapangan bisa berjalan dengan baik

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-8

SASARAN 8 Indikator Kinerja Sasaran	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP Disperin	76	80.15	105.5%	77	82	106%
Persentase aset dalam kondisi baik	76,5%	80%	100%	78%	85%	110%

Capaian indikator-indikator sasaran meningkatkan tatakelola pemerintahan instansi organisasi perangkat daerah pada tabel di atas. Pada tahun 2023 indikator untuk sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan instansi organisasi perangkat daerah terdapat 2 indikator yaitu indikator nilai AKIP Disperin dengan target 77 poin, terealisasi sebesar 82 poin dengan capaian realisasi target sebesar 106% dan persentase asset dalam kondisi baik dengan target 78%, capaian realisasi target sebesar 110% dengan realisasi persentase aset dalam kondisi baik sebesar 85%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran indikator meningkatkan tata kelola pemerintahan instansi Oraganisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diantaranya melalui pendampingan dan koordinasi dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA-PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah
Untuk meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah maka hal-hal yang disarankan perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:
 - 1. Kurangnya pengendalian dalam melaksanakan kebijakan/SOP terkait pengamanan aset kendaraan bermotor atas penguasaan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak berhak, pencurian dan penggunaan aset kendaraan oleh pihak yang tidak berhak.

2. Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas pelaksanaan kebijakan/ SOP Barang Milih Daerah.
3. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mengenai penyusunan laporan keuangan keuangan, inventarisasi barang-barang milik daerah, proses pengumpulan data realisasi anggaran dan SOP penyusunan laporan keuangan Kementerian .
4. Kurangnya monitoring kepada pegawai yang telah ditunjuk sebagai pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola BMD, dan pengelola database secara rutin agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari sub sistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2019, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang - Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
 - a. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.
 - b. Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi akibat belum tersedianya data distributor dan pedagang eceran pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan penyaluran, lemahnya edukasi tentang regulasi pupuk bersubsidi, dan belum optimalnya penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
2. Belum efektif dan efisiennya pelaksanaan pengembangan distribusi dan pemasaran produk dalam negeri
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi dan promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri akibat kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi.
 - b. Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk akibat rendahnya pengembangan kerja sama berbentuk kemitraan, kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi, serta kurangnya pemasaran produk dalam negeri.
3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

4. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya.

Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai eksponya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah. Di dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal. Di pasar internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala dalam memproduksi barang-barang tersebut.

5. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal

Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinu yang menyebabkan keterlambatan produksi.
2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana dan kondisi mesin yang sudah tua

Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada industri kecil menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.

Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri.

II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta

misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.21 Isu Strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
Regulasi Keparasbumian belum ada	Belum keluarnya peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi	Potensi pemanfaatan langsung panas bumi belum optimal.	Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi.
		Tidak tersedianya dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi	Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi.
Belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis	Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Masih banyak pedagang ditingkat eceran yang menjual barang kebutuhan pokok dan barang strategis di atas harga eceran tertinggi (het)	Penetapan dan pengawasan harga yang kurang efektif menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di tingkat eceran, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan inflasi.
		Belum tersedianya data tentang produksi, kebutuhan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Ketiadaan data yang terintegrasi menghambat perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam mengelola distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis.
		Mekanisme pemantauan dan pengawasan harga dan stok	Pemantauan dan pengawasan yang kurang optimal terhadap harga dan stok barang strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		barang kebutuhan pokok dan barang strategis belum optimal	dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta potensi spekulasi harga.
		Belum adanya data tentang perdagangan antar wilayah	Ketiadaan data perdagangan antar wilayah menghambat analisis dan optimalisasi distribusi barang antar wilayah, yang dapat menyebabkan ketimpangan distribusi dan disparitas harga.
	Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi	Belum tersedianya data distributor, agen dan penjual eceran pupuk bersubsidi	Kurangnya data yang memadai tentang rantai distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan ketidakjelasan dalam pemantauan distribusi dan potensi penyalahgunaan subsidi.
		Masih lemahnya pengawasan penyaluran pupuk distribusi ditingkat distributor ke pedagang pengecer pupuk.	Pengawasan yang kurang kuat pada penyaluran pupuk di tingkat distributor dan pengecer mengakibatkan penyaluran yang tidak merata dan potensi penyimpangan distribusi.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		Masih lemahnya edukasi tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pupuk bagi distributor, agen dan pengecer pupuk.	Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil
		Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi (RDKK) masih belum optimal	Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil
Belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri	Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi & promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri	Kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi	Intensifikasi promosi yang belum optimal
	Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk	Kurangnya pengembangan kerja sama kemitraan	Intensifikasi promosi yang belum optimal
		Kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi &	Intensifikasi promosi yang belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		pengenalan produk ke masyarakat luas	
		Masih kurangnya pemasaran produk dalam negeri	Intensifikasi promosi yang belum optimal
Belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan	Masih adanya pelaku usaha toko modern dan pergudangan yang belum berizin	Kurang pengawasan terhadap gudang	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
		Gudang tidak terdata dan belum memiliki izin	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
		Kurang pengawasan terhadap toko modern	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
	Penerima/ pemberi waralaba belum memiliki STPW	Kurang adanya sosialisasi STPW	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, gudang, dan perusahaan waralaba
	Pelayanan kemetrologian legal masih belum optimal	Kurangnya SDM penara yang dimiliki	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemetrologian legal.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		Belum optimalnya pelayanan metrologi legal atas permintaan wajib tera ulang (WTU)/OKO.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Belum terlaksananya pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar pemda/pasar desa secara menyeluruh.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)/barang dalam keadaan terbungkus (BDK) pasca tera/tera ulang belum optimal	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kemetrologian kepada masyarakat.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
Daya Saing Pasar Rakyat Masih rendah	Sarana dan prasarana pasar rakyat belum memenuhi standar pasar sehat	Kurangnya pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Pengelolaan pasar rakyat belum optimal	Masih rendahnya kompetensi pengelola pasar rakyat	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pedagang pasar rakyat dan kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang	Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Sebagian harga komoditi di pasar rakyat kurang bersaing dan masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar	Masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Kurang tertatanya PKL di sekitar pasar rakyat	PKL yang terorganisir	Belum tertatanya pedagang kaki lima di lingkungan sekitar pasar rakyat
Masih rendahnya tingkat daya saing industri besar dan industri kecil menengah (IKM)	Masih lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri menjadi rendah	Rendahnya tingkat Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja industri/pelaku IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Bahan baku, barang modal dan bahan penolong masih tergantung pada produk impor	Masih terbatasnya bahan baku, barang modal dan bahan penolong lokal	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Masih rendahnya penerapan Standar Industri	Kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha Industri dalam menerapkan standar industri	Belum terbentuknya sentra industri
	Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang rencana pembangunan industri daerah	Belum tersedianya data industri yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perindustrian Daerah	Belum optimalnya pelaporan industri pada SIINAS
	Belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha dan akses permodalan.	Kurangnya pengetahuan para pelaku IKM tentang pengelolaan manajemen keuangan.	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki para IKM	Kurangnya Modal Usaha yang dimiliki IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku IKM	Kurangnya tingkat pendidikan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimal pengelolaan modal/pembiayaan/ma najemen usaha	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimalnya Legalitas Usaha/Legalitas Produk	Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap legal formal	Rendahnya Kesadaran Perusahaan industri dalam perizinan
	Belum optimalnya penggunaan media Promosi/Media Sosial	Kurangnya penguasaan IT di kalangan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum terbentuknya asosiasi Industri Per Komoditi IKM	Kurangnya motivasi membentuk asosiasi per komoditi	Belum terbentuknya Sentra Industri
Masih kurangnya IKM berpotensi Ekspor	Rendahnya peluang usaha bagi IKM	Belum tersedianya informasi peluang usaha bagi IKM	Intensifikasi Promosi IKM
	Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap bisnis ekspor	1. Kurangnya informasi pasar 2. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi perdagangan luar negeri 3. kurangnya modal	Intensifikasi Promosi IKM

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada bagian *review* terhadap Rancangan RKPD dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengusulkan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Peralatan kantor pendukung operasional Galeri Kriya Bedas
2. Pembelian mebel di Galeri Kriya Bedas dan UPTD
3. Belanja jasa keamanan dan *Cleaning Service* Galeri Kriya Bedas
4. Biaya pemeliharaan dan bayar pajak kendaraan pelayanan dan operasional Dinas
5. Fasilitas rak gondola bagi IKM binaan
6. Pengadaan Mobile Laboratorium bahan Kepokmas
7. Pembelian alat MPOS (E-Retribusi) dan Lisensi
8. Pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
9. Penambahan anggaran kegiatan OPM
10. Pameran INACRAFT, APKASI, Food Ethnik, Fasilitas Pameran di Mall
11. Belanja modal peralatan pengujian UTTP
12. Belanja modal peralatan pengawasan UTTP
13. Bazar Ramadhan
14. Kegiatan bisnis *matching* P3DN
15. Sosialisasi dan fasilitas P3DN
16. Kajian RIPIK
17. Sertifikasi profesi pengolahan Kopi
18. DED rumah kemasan

Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 31. Review terhadap Rancangan Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Disperdagin	Nilai AKIP	86 Poin	37.438.124.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Disperdagin	Nilai AKIP	86 Poin	39.603.346.960,00
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%	517.240.000,00	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%	517.240.000,00
3.30.01.2.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.850.000,00	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.850.000,00
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	94.350.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	94.350.000,00
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000,00
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000,00
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	72.500.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	72.500.000,00
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen	100%	33.277.620.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen	100%	33.277.620.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan					anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan		
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	33.238.620.000,00	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	33.238.620.000,00
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	100%	5.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	100%	5.000.000,00
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	422.500.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100%	472.500.000,00
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000,00
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.000.000,00
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperdagin	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	47.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperdagin	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	47.500.000,00
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.500.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.500.000,00
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase pelayanan operasional perkantoran	100%	2.723.164.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase pelayanan operasional perkantoran	100%	4.605.045.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	183.604.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	215.485.000,00
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.534.560.000,00	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.384.560.000,00
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	265.100.000,00	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Disperdagin	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	265.100.000,00
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000,00
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000,00
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000,00	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000,00
3.30.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin		100%	180.000.000,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin		100%	413.341.960,00
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	180.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	413.341.960,00
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL	Disperdagin				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL	Disperdagin			
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Disperdagin	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	80%	268.900.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Disperdagin	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	80%	268.900.000,00
3.29.05.2.01	Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	80%	268.900.000,00	Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	80%	268.900.000,00
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	168.900.000,00	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	168.900.000,00
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	50.000.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	50.000.000,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Disperdagin				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Disperdagin			
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperdagin	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	75%	233.500.000,00	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperdagin	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	75%	233.500.000,00
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Disperdagin	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin	75%	203.500.000,00	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Disperdagin	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin	75%	203.500.000,00
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat	1 Dokumen	203.500.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat	1 Dokumen	203.500.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Persentase gudang yang memiliki tanda daftar	25%	15.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Persentase gudang yang memiliki tanda daftar	25%	15.000.000,00
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000,00
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	10%	15.000.000,00	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Disperdagin	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	10%	15.000.000,00
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	15.000.000,00
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperdagin	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	23%	1.766.064.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperdagin	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	23%	2.766.064.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	70%	1.678.564.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	70%	2.678.564.000,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.569.114.000,00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	2.569.114.000,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	109.450.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	109.450.000,00
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagin	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	10%	87.500.000,00	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagin	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	10%	87.500.000,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	87.500.000,00	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	87.500.000,00
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperdagin	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	3%	876.960.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperdagin	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	3%	2.106.960.000,00
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Disperdagin	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	53%	131.960.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Disperdagin	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	53%	131.960.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	131.960.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	131.960.000,00
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING	0,89	720.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING	0,89	1.950.000.000,00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000,00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	25.000.000,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	25.000.000,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan	1 Laporan	670.000.000,00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan	1 Laporan	1.900.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota		Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota		Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	90%	25.000.000,00	Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	90%	25.000.000,00
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	25.000.000,00	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	25.000.000,00
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Disperdagin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	\$ 727.287.122	436.378.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Disperdagin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	\$ 727.287.122	436.378.000,00
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	3%	436.378.000,00	Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	3%	436.378.000,00
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Produk Ekspor Unggulan					Produk Ekspor Unggulan		
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	61.378.000,00	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	61.378.000,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Disperdagin	Persentase Alat UTPP sesuai standar	95%	454.747.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Disperdagin	Persentase Alat UTPP sesuai standar	95%	454.747.000,00
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan	Disperdagin	Persentase Alat UTPP Yang Bertanda Tera Sah	95%	454.747.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan	Disperdagin	Persentase Alat UTPP Yang Bertanda Tera Sah	95%	454.747.000,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	206.960.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	206.960.000,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	247.787.000,00	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	247.787.000,00
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperdagin	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	35%	150.000.000,00	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperdagin	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	35%	500.000.000,00
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri	Disperdagin	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	80%	150.000.000,00	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri	Disperdagin	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	80%	500.000.000,00
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi	40 UMKM	75.000.000,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi	40 UMKM	425.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	75.000.000,00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	75.000.000,00
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN	Disperdagin				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN	Disperdagin			
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperdagin	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	80%	3.956.960.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperdagin	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	80%	4.978.054.340,00
3.31.02.2.01	Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	5 Dokumen	3.956.960.000,00	Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	5 Dokumen	4.978.054.340,00
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1.493.304.500,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	2.459.621.800,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.675.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.675.000.000,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	468.655.500,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	468.655.500,00
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00
3.31.02.2.01.07	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperdagin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang	1 Dokumen	5.000.000,00	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperdagin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang	1 Dokumen	59.777.040,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan					dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperdagin	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	12,50%	281.960.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperdagin	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	12,50%	401.960.000,00
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	20 Perusahaan	281.960.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	20 Perusahaan	401.960.000,00
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan	1 Dokumen	131.960.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan	1 Dokumen	131.960.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha	1 Dokumen	150.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha	1 Dokumen	270.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			tertentu yang menjadi					tertentu yang menjadi		
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperdagin	Persentase pelaporan SIINAS	20%	850.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperdagin	Persentase pelaporan SIINAS	20%	850.000.000,00
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	20%	850.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	20%	850.000.000,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000,00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000,00
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	650.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	650.000.000,00
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	1 Dokumen	50.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	1 Dokumen	50.000.000,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	dalamPenyampaian Data ke SIINas		dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			dalamPenyampaian Data ke SIINas		dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		
	JUMLAH TOTAL			46.713.593.000,00					52.599.910.300,00	

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung

Verifikator
JFT Perencana Muda

Soreang, Juni 2025
Kepala Bidang Perencanaan
Pembangunan Perekonomian dan
Sumber Daya Air

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si
NIP: 19740717 199803 1 003

PUNI SERUNI
NIP :19790912 200501 2 008

DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT.
NIP: 19800327 200501 1 012

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk Rencana Kerja 2025, total kebutuhan awal yang semula sebesar Rp46.713.593.000,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp52.599.910.300,00. Penyesuaian ini dilakukan setelah melalui proses analisis mendalam terhadap 11 Program, 23 Kegiatan, dan 61 Sub Kegiatan yang telah diidentifikasi.

Dengan penyesuaian ini, diharapkan Rencana Kerja 2025 dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

Musrembang diadakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Disperdagin dengan usulan dari kecamatan, serta menyelaraskan indikator, target, pendanaan, dan program antar dinas. Terdiri dari delegasi dari 62 kecamatan dan tamu undangan dari dinas terkait dan stakeholder.

Acara Forum Perangkat Daerah meliputi pembukaan, rapat pleno, pembahasan usulan program dan kegiatan, dan penandatanganan berita acara kesepakatan.

Tujuannya adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

TABEL T-C. 32.

DAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN MUSRENBANG TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ancolmekar	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
2	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarjaya	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mekarjaya	Arjasari	10	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 36.940.650,00
4	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Pinggirsari	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
5	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	10	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 36.940.650,00
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
7	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
8	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
9	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
11	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
12	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Batukarut	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
13	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Rancamanyar	Baleendah	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
14	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Bojongmalaka	Baleendah	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
15	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Baleendah	Baleendah	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
16	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Jelegong	Baleendah	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margahurip	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
18	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Banjaran Wetan	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
19	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Banjaran Kulon	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 6.267.820,00
20	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Sindangpanon	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
21	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarjaya	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
22	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarjaya	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
23	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Banjaran Wetan	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Kamasan	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
25	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Kamasan	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
26	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tarajusari	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
27	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Tarajusari	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
28	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Tarajusari	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
29	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Lengkong	Bojongsoang	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 9.401.730,00
30	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Lengkong	Bojongsoang	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 6.816.375,00
32	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
33	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
34	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Boongsari	Bojongsoang	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 6.816.375,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
35	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tegalluar	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
36	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Jatisari	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
37	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Jatisari	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
39	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
40	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
41	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
42	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
43	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
44	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Bandasari	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Nagrog	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
46	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Nagrog	Cicalengka	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
47	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margaasih	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
48	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tanjungwangi	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
49	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Panenjoan	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
50	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikuya	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
51	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cikuya	Cicalengka	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cicalengka Wetan	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
53	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tanjunglaya	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
54	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarlaksana	Cikancung	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00
55	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarlaksana	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
56	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Tanjunglaya	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
57	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cikasungka	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
58	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cikasungka	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mandalasari	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
60	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Hegarmanah	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
61	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ciluluk	Cikancung	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00
62	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Ciluluk	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
63	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Girimekar	Cilengkrang	20	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 45.432.300,00
64	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Girimekar	Cilengkrang	0	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp -
65	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cibiru Wetan	Cileunyi	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cileunyi Wetan	Cileunyi	6	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 13.632.750,00
67	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cimekar	Cileunyi	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 10.917.540,00
68	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cinunuk	Cileunyi	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 9.086.460,00
69	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cileunyi Kulon	Cileunyi	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
70	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarsari	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
71	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Warjabakti	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
72	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Warjabakti	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Pasirhuni	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
74	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Pasirhuni	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
75	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Campakamulya	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
76	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Campakamulya	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Industri Dan Peran Serta Masyarakat							
77	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mandalamekar	Cimencyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
78	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cibeunying	Cimencyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
79	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarmanik	Cimencyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarmanik	Cimenyan	6	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 13.632.750,00
81	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarmanik	Cimenyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
82	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cimenyan	Cimenyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
83	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Serangmekar	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
84	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Babakan	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
85	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Babakan	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
86	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Ciparay	Ciparay	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunharja	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
88	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Gunungleutik	Ciparay	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 7.834.775,00
89	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Panyocokan	Ciwidey	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
90	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan	#MS Bimtek Roasting Kopi	Rawabogo	Ciwidey	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumberdaya Industri							
91	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Nengkelan	Ciwidey	1	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 2.729.385,00
92	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Panundaan	Ciwidey	1	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 2.729.385,00
93	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Sukawening	Ciwidey	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Sukawening	Ciwidey	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00
95	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Citeureup	Dayeuhkolot	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 7.834.775,00
96	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Citeureup	Dayeuhkolot	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00
97	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Citeureup	Dayeuhkolot	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
98	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ibun	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
99	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Dukuh	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
100	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Dukuh	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Laksana	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
102	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Laksana	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
103	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Lampegan	Ibun	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 6.267.820,00
104	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Lampegan	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
105	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Lampegan	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
106	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Neglasari	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
107	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Banyusari	Katapang	20	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 54.587.700,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Sukapura	Kertasari	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00
109	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cihawuk	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
110	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cihawuk	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
111	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Neglawangi	Kertasari	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
112	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Neglawangi	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
113	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cikembang	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
114	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cikembang	Kertasari	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikembang	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
116	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Santosa	Kertasari	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
117	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Santosa	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
118	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tarumajaya	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peran Serta Masyarakat							
119	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Padasuka	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
120	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cilame	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
121	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cilame	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Jatisari	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
123	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Wangisagara	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
124	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Wangisagara	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
125	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Majalaya	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
126	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Padamulya	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
127	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padaulun	Majalaya	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 8.188.155,00
128	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Padaulun	Majalaya	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Biru	Majalaya	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 8.188.155,00
130	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padamulya	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
131	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Neglasari	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
132	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Nanjung	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
133	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Rahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
134	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Rahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
135	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Rahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Rahayu	Margaasih	4	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 14.776.260,00
137	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
138	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cigondewah Hilir	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
139	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peran Serta Masyarakat							
140	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
141	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
142	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
144	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
145	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Magahayu Selatan	Margahayu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
146	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Sulaiman	Margahayu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
147	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margahayu Tengah	Margahayu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
148	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Citaman	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
149	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Citaman	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Citaman	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
151	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ganjar Sabar	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
152	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Ganjar Sabar	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
153	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Bojong	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peran Serta Masyarakat							
154	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarsari	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
155	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarsari	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
156	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Girimulya	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Girimulya	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
158	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikawao	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
159	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikawao	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
160	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cikitu	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
161	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
162	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
163	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikitu	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
165	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tanjungwangi	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
166	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cikawao	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
167	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Industri Dan Peran Serta Masyarakat							
168	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Rancatungku	Pameungpeuk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
169	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Bojongkunci	Pameungpeuk	1	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 3.694.065,00
170	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Bojongmanggu	Pameungpeuk	1	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 3.694.065,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Langonsari	Pameungpeuk	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
172	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Langonsari	Pameungpeuk	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
173	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Margamekar	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
174	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Margamekar	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Industri Dan Peran Serta Masyarakat							
175	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Lamajang	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
176	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margaluyu	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
177	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margaluyu	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Sukamanah	Pangalengan	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
179	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Pulosari	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
180	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
181	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
182	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
183	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
184	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Pangalengan	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Karangtunggal	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
186	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Karangtunggal	Paseh	1	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 1.566.955,00
187	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cigentur	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
188	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Drawati	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumberdaya Industri							
189	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Drawati	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
190	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Sukamanah	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
191	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Sukamanah	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Sukamanah	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
193	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Loa	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
194	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarpawitan	Paseh	1	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 1.566.955,00
195	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mekarpawitan	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumberdaya Industri							
196	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cigentur	Paseh	0	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp -
197	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tangsimekar	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
198	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tangsimekar	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Sindangsari	Paseh	6	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 13.632.750,00
200	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margamulya	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
201	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarmaju	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
202	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Tenjolaya	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
203	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cisondari	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
204	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarsari	Pasirjambu	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00
205	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarsari	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cibodas	Pasirjambu	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00
207	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cibodas	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
208	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margamulya	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
209	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cikoneng	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
210	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarsari	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
211	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Patengan	Rancabali	10	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 22.721.250,00
212	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cipelah	Rancabali	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Alamendah	Rancabali	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00
214	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Alamendah	Rancabali	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 6.267.820,00
215	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Bojongloa	Rancaekek	20	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 45.442.500,00
216	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padamukti	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
217	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padamukti	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
218	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Padamukti	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
219	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Bojongemas	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Bojongemas	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
221	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Solokanjeruk	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
222	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Solokanjeruk	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Rancakasumba	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
224	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Solokanjeruk	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Soreang	Soreang	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 15.669.550,00
TOTAL										Rp 1.518.200.800

Soreang, Juni 2025

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung

Verifikator
JFT Perencana Muda

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian dan Sumber Daya Air

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si
NIP: 19740717 199803 1 003

PUNI SERUNI
NIP :19790912 200501 2 008

DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT.
NIP: 19800327 200501 1 012

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan, terdapat 225 usulan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang menjadi bahan diskusi dan diseleksi berdasarkan 4 kriteria teknis dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyetujui usulan musrenbang melalui Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 sebanyak 217 usulan dengan nilai Rp1.518.200.800 untuk 600 peserta dengan 5 jenis pelatihan, yaitu Bimtek Perbengkelan/Service Motor, Bimtek Kemasan Bagi IKM, Bimtek Kerajinan Rumah Tangga, Bimtek Roasting Kopi, dan Bimtek Perbengkelan Las.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perubahan Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat, RPJM Provinsi Jawa Barat, RKPD Provinsi Jawa Barat 2015; dan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung 2025.

III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telaahan Kementerian Perdagangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang - Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang- Undang 17 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 4 atau dalam periode 2020-2024 memiliki arah kebijakan untuk Pengembangan diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta mempertahankan peran lumbung pangan nasional. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam

periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Perdagangan memiliki 12 (dua belas) arah kebijakan. Masing-masing arah kebijakan memiliki strategi-strategi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan seperti berikut:

1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, strategi ini dilakukan melalui pengamanan pangsa ekspor; meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif.
2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional; strategi ini dilakukan dengan meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.
3. Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok, strategi ini dilakukan dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan peningkatan koordinasi dan peran Pemerintah Daerah dalam kelancaran distribusi.
4. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, strategi ini dilakukan melalui peningkatan akurasi data harga barang kebutuhan pokok; peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok; dan optimalisasi pengelolaan impor barang kebutuhan pokok.

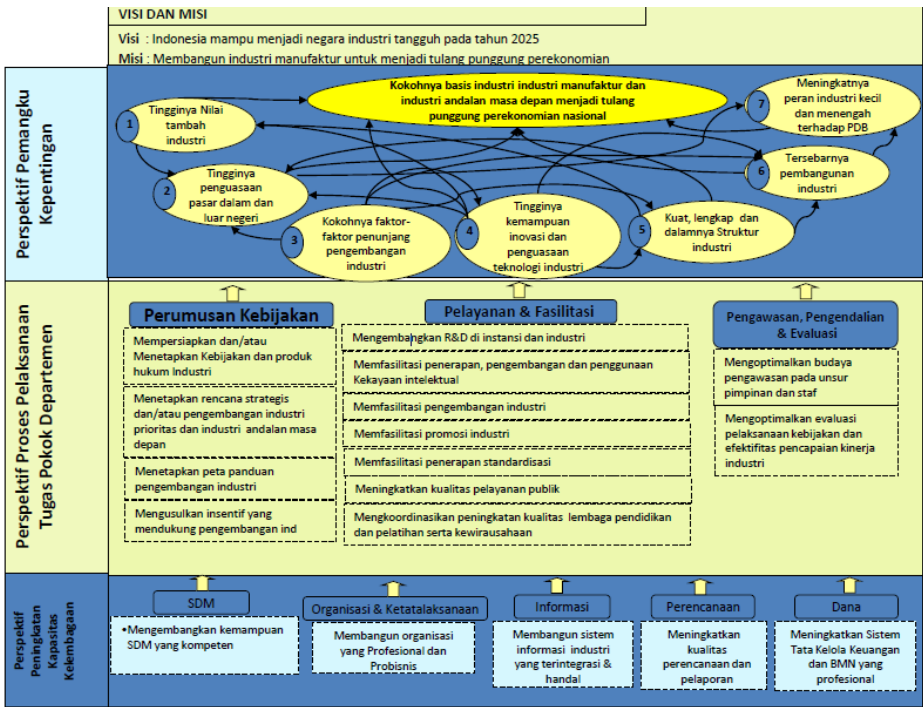
2. Telaahan Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2019-2025 Sebagai amanat Undang - Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035.

RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.



Gambar. 3.1. Peta Strategis Kementerian Perindustrian

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- 1) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah produktivitas perindustrian yang berdaya saing

2. Sasaran

- 1) Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran
- 2) Meningkatnya Distribusi Presentase PDRB Industri Pengolahan

Tabel T-C. 33

Tabel Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Perdagangan dan Perindustrian Daerah produktivitas perindustrian yang berdaya saing	Meningkatnya Distribusi Persentase PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan		
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung		
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting			
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase updating data harga dan stok SIBAPOKTING di tingkat pasar		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer		
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola		
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin			
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase gudang yang memiliki tanda daftar		
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW		
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP sesuai standar			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera yang sah		
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	
			Penyidikan Metrologi Legal			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
		Meningkatnya Distribusi Presentase PDRB Industri Pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana pembangunan industri		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Perizinan Berusaha Terintegrasi			dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang	
			secara Elektronik			Terintegrasi dengan Sistem OSS	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pelaporan SIINAS			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan		
			Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Prosedur dan Pesyaratan IzinPemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	
			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	

X

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk Tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung mempunyai Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah
- 3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- 4) Administrasi umum perangkat daerah
- 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- 6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- 8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

- 1) Penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota

3) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- 1) Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan
- 2) Penerbitan tanda daftar gudang
- 3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri

4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- 1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

- 2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- 1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
- 3) Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota

6) Program Pengembangan Ekspor

- 1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- 1) Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan

8) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- 1) Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri

9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

- 1) Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota

10) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota

11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- 1) Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BANDUNG

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperdagi n	Nilai AKIP	86 Poin	39.603.346.960	42.281.564.738	APBD Kab. Bandung	87 Poin	35.851.922.000	Disperdagi n
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagi n	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 %	517.240.000	479.014.721	APBD Kab. Bandung	100%	444.200.000	Disperdagi n
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.850.000	346.389.286	APBD Kab. Bandung	2 Dokumen	234.850.000	Disperdagi n
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperdagi n	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	10.000.000	-	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000	Disperdagi n
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	8.320.000	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000	Disperdagi n

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Disperdagi n	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	3.435.194	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	10.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	5.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagi n	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	94.350.000	10.890.700	APBD Kab. Bandun g	3 Dokumen	94.350.000	Disperdagin
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Disperdagi n	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000	27.941.041	APBD Kab. Bandun g	4 Laporan	80.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000	75.540.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	75.540.000	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statististik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	72.500.000	1.498.500	APBD Kab. Bandung	60 Data	72.500.000	Disperdagin
3.30.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	100 %	33.277.620.000	35.923.519.062	APBD Kab. Bandung	100%	32.031.191.665	Disperdagin
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/bulan	33.238.620.000	35.902.695.262	APBD Kab. Bandung	223 Orang/Bulan	31.992.191.665	Disperdagin
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000	8.060.400	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	2.787.100	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperdagi n	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000	9.976.300	APBD Kab. Bandun g	2 Laporan	14.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperdagi n	Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	100 %	5.000.000	3.520.000	APBD Kab. Bandun g	100%	5.000.000	Disperdagi n
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagi n	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	3.520.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	5.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperdagi n	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	472.500.000	337.416.643	APBD Kab. Bandun g	100%	422.500.000	Disperdagi n
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperdagi n	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	7.500.000	APBD Kab. Bandun g	1 Paket	7.500.000	Disperdagin
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagi n	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000	108.087.843	APBD Kab. Bandun g	1 Paket	125.000.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagi n	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	9.996.600	APBD Kab. Bandun g	1 Paket	10.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagi n	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	10.000.000	APBD Kab. Bandun g	1 Paket	10.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Disperdagi n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.000.000	98.336.000	APBD Kab. Bandun g	1 Paket	80.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	16.380.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	20.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagi n	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000	15.670.000	APBD Kab. Bandun g	20 Laporan	20.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagi n	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.000.000	71.446.200	APBD Kab. Bandun g	80 Laporan	150.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperdagi n	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	47.500.000	-	APBD Kab. Bandun g	100%	47.500.000	Disperdagi n
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagi n	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	37.500.000	-	APBD Kab. Bandun g	1 Unit	37.500.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Disperdagi n	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	5.000.000	-	APBD Kab. Bandun g	1 Unit	5.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagi n	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	5.000.000	-	APBD Kab. Bandun g	1 Unit	5.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Disperdagi n	Persentase pelayanan operasional perkantoran	100 %	4.605.045.000	4.900.792.352	APBD Kab. Bandun g	100%	2.456.004.000	Disperdagi n
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagi n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	215.485.000	315.484.572	APBD Kab. Bandun g	1 Laporan	183.604.000	Disperdagin
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagi n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000	2.000.000	APBD Kab. Bandun g	1 Laporan	5.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Disperdagi n	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.384.560.000	4.583.307.780	APBD Kab. Bandun g	1 Laporan	2.267.400.000	Disperdagin
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Disperdagi n	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	265.100.000	223.960.000	APBD Kab. Bandun g	100%	265.100.000	Disperdagi n

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000	40.000.000	APBD Kab. Bandung	10 Unit	40.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000	58.990.000	APBD Kab. Bandung	12 Unit	70.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	5.000.000	-	APBD Kab. Bandung	2 Unit	5.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000	24.970.000	APBD Kab. Bandung	8 Unit	25.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000	100.000.000	APBD Kab. Bandung	1 Unit	125.100.000	Disperdagin
3.30.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin		100 %	413.341.960	413.341.960	APBD Kab. Bandung	100%	180.000.000	Disperdagin
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	413.341.960	413.341.960	APBD Kab. Bandung	2 Orang/Bulan	180.000.000	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL	Disperdagin					APBD Kab. Bandun g	0,00		Disperdagin
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Disperdagin	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	80 %	268.900.000	81.580.000	APBD Kab. Bandun g	100%	268.900.000	Disperdagin
3.29.05.2.01	Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	80 %	268.900.000	81.580.000	APBD Kab. Bandun g	100%	268.900.000	Disperdagin
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	50.000.000	-	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	50.000.000	Disperdagin
3.29.05.2.01.02	Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	168.900.000	76.360.000	APBD Kab. Bandun g	2 Dokumen	168.900.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperdagi n	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	50.000.000	5.220.000	APBD Kab. Bandun g	17 Laporan	50.000.000	Disperdagin
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN	Disperdagi n					APBD Kab. Bandun g	0,00		Disperdagi n
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperdagi n	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	75 %	233.500.000	48.166.700	APBD Kab. Bandun g	80%	233.500.000	Disperdagi n
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan	Disperdagi n	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin	75 %	203.500.000	18.166.700	APBD Kab. Bandun g	80%	203.500.000	Disperdagi n
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	Disperdagi n	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	203.500.000	18.166.700	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	203.500.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagi n	Persentase gudang yang memiliki tanda daftar	25 %	15.000.000	15.000.000	APBD Kab. Bandun g	30%	15.000.000	Disperdagi n
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	15.000.000	Disperdagin
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Disperdagi n	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	10 %	15.000.000	15.000.000	APBD Kab. Bandun g	10%	15.000.000	Disperdagi n
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagi n	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	15.000.000	15.000.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	15.000.000	Disperdagin
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperdagi n	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	23 %	2.766.064.000	3.196.121.795	APBD Kab. Bandun g	25%	1.834.104.000	Disperdagi n

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagi n	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	70 %	2.678.564.000	3.171.390.700	APBD Kab. Bandun g	75%	1.746.604.000	Disperdagi n
3.30.03.2.01.0 1	Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagi n	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	2.569.114.000	3.154.865.700	APBD Kab. Bandun g	3 Unit	1.637.154.000	Disperdagin
3.30.03.2.01.0 2	Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	Disperdagi n	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	109.450.000	16.525.000	APBD Kab. Bandun g	11 Unit	109.450.000	Disperdagin
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagi n	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	10 %	87.500.000	24.731.095	APBD Kab. Bandun g	13%	87.500.000	Disperdagi n
3.30.03.2.02.0 1	Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	87.500.000	24.731.095	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	87.500.000	Disperdagin
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperdagi n	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	3 %	2.106.960.000	4.406.569.950	APBD Kab. Bandun g	3%	945.000.000	Disperdagi n
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota	Disperdagi n	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	53 %	131.960.000	73.900.000	APBD Kab. Bandun g	54%	200.000.000	Disperdagi n

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	131.960.000	73.900.000	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	200.000.000	Disperdagin
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING	89 %	1.950.000.000	4.331.649.950	APBD Kab. Bandung	89%	720.000.000	Disperdagin
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000	1.563.000	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	25.000.000	Disperdagin
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	25.000.000	680.000	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	25.000.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1.900.000.000	4.329.406.950	APBD Kab. Bandun g	1 Laporan	670.000.000	Disperdagin
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	45 %	25.000.000	1.020.000	APBD Kab. Bandun g	90%	25.000.000	Disperdagin
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	25.000.000	1.020.000	APBD Kab. Bandun g	12 Laporan	25.000.000	Disperdagin
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Disperdagin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	727287122 \$	436.378.000	192.237.500	APBD Kab. Bandun g	\$ 727.432.463	436.378.000	Disperdagin
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	3 %	436.378.000	192.237.500	APBD Kab. Bandun g	3%	436.378.000	Disperdagin
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000	138.174.500	APBD Kab. Bandun g	4 Pelaku Usaha	150.000.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	75.000.000	49.700.000	APBD Kab. Bandung	5 Pelaku Usaha	75.000.000	Disperdagin
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha	150.000.000	2.150.000	APBD Kab. Bandung	3 Pelaku Usaha	150.000.000	Disperdagin
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	61.378.000	2.213.000	APBD Kab. Bandung	15 Produk	61.378.000	Disperdagin
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Disperdagin	Persentase Alat UTTP sesuai standar	95 %	454.747.000	219.415.500	APBD Kab. Bandung	100%	522.787.000	Disperdagin
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan	Disperdagin	Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	95 %	454.747.000	219.415.500	APBD Kab. Bandung	100%	522.787.000	Disperdagin
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	206.960.000	179.206.500	APBD Kab. Bandung	5000 Unit	275.000.000	Disperdagin
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	247.787.000	40.209.000	APBD Kab. Bandung	200 Orang	247.787.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperdagin	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	35 %	500.000.000	358.841.232	APBD Kab. Bandung	42%	150.000.000	Disperdagin
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri	Disperdagin	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	80 %	500.000.000	358.841.232	APBD Kab. Bandung	100%	150.000.000	Disperdagin
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	425.000.000	356.971.232	APBD Kab. Bandung	40 UMKM	75.000.000	Disperdagin
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	75.000.000	1.870.000	APBD Kab. Bandung	40 UMKM	75.000.000	Disperdagin
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN	Disperdagin					APBD Kab. Bandung			Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperdagi n	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	80 %	4.978.054.340	5.163.927.200	APBD Kab. Bandun g	100%	2.525.000.000	Disperdagi n
3.31.02.2.01	Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota	Disperdagi n	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	5 Dokumen	4.978.054.340	5.163.927.200	APBD Kab. Bandun g	5 Dokumen	2.525.000.000	Disperdagi n
3.31.02.2.01.0 2	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	150.000.000	79.440.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	150.000.000	Disperdagin
3.31.02.2.01.0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	2.459.621.800	1.736.034.200	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	150.000.000	Disperdagin
3.31.02.2.01.0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	1.675.000.000	2.436.415.500	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	1.675.000.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	468.655.500	830.497.500	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	380.000.000	Disperdagin
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Disperdagi n	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000	73.040.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	150.000.000	Disperdagin
3.31.02.2.01.07	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagi n	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0 Rekomenda si	5.000.000	-	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	5.000.000	Disperdagin
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperdagi n	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	59.777.040	8.500.000	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	5.000.000	Disperdagin
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagi n	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0 Laporan	5.000.000	-	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	5.000.000	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.02.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0 Rekomendasi	5.000.000	-	APBD Kab. Bandung	-	-	Disperdagin
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperdagin	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	12,5 %	401.960.000	177.889.150	APBD Kab. Bandung	15,00%	350.000.000	Disperdagin
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	20 Perusahaan	401.960.000	177.889.150	APBD Kab. Bandung	20 Perusahaan	350.000.000	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	131.960.000	6.643.850	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	200.000.000	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	270.000.000	171.245.300	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperdagin	Persentase pelaporan SIINAS	20 %	850.000.000	254.095.400	APBD Kab. Bandun g	20%	850.000.000	Disperdagin
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPU, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	20 %	850.000.000	254.095.400	APBD Kab. Bandun g	20%	850.000.000	Disperdagin
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain LingkupKabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000	80.971.400	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	150.000.000	Disperdagin
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	650.000.000	145.902.600	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	650.000.000	Disperdagin

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Penetapan	Perubahan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data ke SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	50.000.000	27.221.400	APBD Kab. Bandun g	1 Dokumen	50.000.000	Disperdagin
Jumlah Total					52.599.910.300	56.380.409.165			43.967.591.000	

Soreang, Juni 2025

Kepala Dinas
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Bandung

Verifikator
JFT Perencana Muda

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan
Perekonomian dan Sumber Daya Air

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si
NIP: 19740717 199803 1 003

PUNI SERUNI
NIP :19790912 200501 2 008

DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT.
NIP: 19800327 200501 1 012

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Jawa Barat, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Disperda gin	Nilai AKIP	86 Poin	42.281.564 .738

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
3.30.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100 %	479.014.721
3.30.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	346.389.286
3.30.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	-
3.30.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.320.000
3.30.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.435.194
3.30.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
3.30.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	10.890.700
3.30.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	27.941.041
3.30.01.2.0 1.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000
3.30.01.2.0 1.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	1.498.500
3.30.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperdagin	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	100 %	35.923.519.062
3.30.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/bulan	35.902.695.262
3.30.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	8.060.400

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
3.30.01.2.0 2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperda gin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.787.100
3.30.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disperda gin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	9.976.300
3.30.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Disperda gin	Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi	100 %	3.520.000
3.30.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperda gin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.520.000
3.30.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperda gin	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	100 %	337.416.643
3.30.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disperda gin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000
3.30.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperda gin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.087.843
3.30.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperda gin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9.996.600
3.30.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperda gin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
3.30.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disperda gin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	98.336.000
3.30.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disperda gin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	16.380.000
3.30.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperda gin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	15.670.000
3.30.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperda gin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	71.446.200
3.30.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disperda gin	Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	-
3.30.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperda gin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	0 Unit	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
			Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
3.30.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Disperda gin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-
3.30.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperda gin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-
3.30.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperda gin	Persentase pelayanan operasional perkantoran	100 %	4.900.792.352
3.30.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperda gin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	315.484.572
3.30.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperda gin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.000.000
3.30.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disperda gin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.583.307.780
3.30.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperda gin	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100 %	223.960.000
3.30.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Disperda gin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000
3.30.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disperda gin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	58.990.000
3.30.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Disperda gin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-
3.30.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperda gin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	24.970.000
3.30.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disperda gin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
3.30.01.2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperda gin		100 %	413.341.960
3.30.01.2.1 1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperda gin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	413.341.960
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Disperda gin			
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Disperda gin	Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola	80 %	81.580.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
3.29.05.2.0 1	Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperda gin	Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan	80 %	81.580.000
3.29.05.2.0 1.01	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperda gin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	0 Dokumen	-
3.29.05.2.0 1.02	Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperda gin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	76.360.000
3.29.05.2.0 1.03	Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperda gin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	5.220.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN	Disperda gin			
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Disperda gin	Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin	75 %	48.166.700
3.30.02.2.0 1	Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan	Disperda gin	Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin	75 %	18.166.700
3.30.02.2.0 1.01	Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	Disperda gin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	18.166.700
3.30.02.2.0 2	Penerbitan Tanda DaftarGudang	Disperda gin	Persentase gudang yang memiliki tanda daftar	25 %	15.000.000
3.30.02.2.0 2.01	Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang	Disperda gin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	15.000.000
3.30.02.2.0 3	Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri	Disperda gin	Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW	10 %	15.000.000
3.30.02.2.0 3.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperda gin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang	1 dokumen	15.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
			terintegrasi secara elektronik		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Disperdagin	Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar	23 %	3.196.121.795
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	70 %	3.171.390.700
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	3.154.865.700
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	16.525.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Disperdagin	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	10 %	24.731.095
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	24.731.095
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disperdagin	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu	3 %	4.406.569.950
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Disperdagin	Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	53 %	73.900.000
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	73.900.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Disperdagin	Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING	89 %	4.331.649.950
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.563.000
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	680.000
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	2 Laporan	4.329.406.950

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
			dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota	Disperda gin	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer	45 %	1.020.000
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperda gin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	1.020.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Disperda gin	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	727287122 \$	192.237.500
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	Disperda gin	Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan	3 %	192.237.500
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperda gin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	138.174.500
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperda gin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	49.700.000
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperda gin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1 Pelaku Usaha	2.150.000
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperda gin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	2.213.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Disperda gin	Persentase Alat UTTP sesuai standar	95 %	219.415.500
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan	Disperda gin	Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah	95 %	219.415.500
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperda gin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	179.206.500
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperda gin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	40.209.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Disperda gin	Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran	35 %	358.841.232
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri	Disperda gin	Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung	80 %	358.841.232
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperda gin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	356.971.232
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperda gin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui	10 UMKM	1.870.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
			kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN	Disperda gin			
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Disperda gin	Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten	80 %	5.163.927.200
3.31.02.2.01	Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota	Disperda gin	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	5 Dokumen	5.163.927.200
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperda gin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	79.440.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri	Disperda gin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1.736.034.200
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri	Disperda gin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	2.436.415.500
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat	Disperda gin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	830.497.500
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri	Disperda gin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	73.040.000
3.31.02.2.01.07	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperda gin	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0 Rekomendasi	-
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperda gin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	8.500.000
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperda gin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	0 Laporan	-

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
3.31.02.2.0 1.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperda gin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	0 Rekomen dasi	-
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Disperda gin	Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin	12,5 %	177.889.15 0
3.31.03.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota	Disperda gin	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	20 Perusaha an	177.889.15 0
3.31.03.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperda gin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	6.643.850
3.31.03.2.0 1.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Disperda gin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	171.245.30 0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Disperda gin	Persentase pelaporan SIINAS	20 %	254.095.40 0
3.31.04.2.0 1	Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota	Disperda gin	Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri	20 %	254.095.40 0

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Perubahan
3.31.04.2.0 1.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	80.971.400
3.31.04.2.0 1.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	145.902.600
3.31.04.2.0 1.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	27.221.400
JUMLAH				56.380.409.164,70	

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 ini membutuhkan total dana sebesar Rp 56.380.409.164,70 untuk melaksanakan 11 program, 23 kegiatan, dan 61 sub kegiatan.

Penyusunan rencana ini didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas program yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya rencana ini, program-program yang tercantum dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB V
P E N U T U P

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerja sama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Barat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis

Soreang, Juni 2025

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

TTD

DICKY ANUGRAH

BUPATI BANDUNG

ttd

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA